



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANTISIPASI CUACA EKSTREM DI AKHIR TAHUN

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Muda
teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kejadian bencana akibat cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini menjadi sulit dihindari, ini terjadi karena masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, selain itu bencana diperburuk akibat dari daya dukung lingkungan yang semakin merosot. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana salah satunya adalah antisipasi dini kebencanaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghadapi kejadian kebencanaan akibat cuaca ekstrem misalnya melakukan instalasi alat pendeteksi dini tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tepatnya di Kampung Pasirsalam. Keadaan tersebut tentunya sangat dibutuhkan, terlebih daerah tersebut termasuk dalam zona merah tanah longsor yang termasuk dalam 47 kecamatan lainnya di Sukabumi.

Di wilayah lain, Bangka Belitung, antisipasi dilakukan dengan menyiagakan tidak kurang dari 500 tim gabungan untuk menghadapi banjir serta bencana angin kencang. Di Jawa Tengah, warga Pacitan sedang waspada karena ancaman gerakan tanah, Karena sudah banyak rumah yang mengalami kerusakan (lantai retak dan amblas) Pemerintah Jawa Tengah berjanji akan menggulirkan pendanaan untuk perbaikan rumah di lahan relokasi seluas 3,6 hektare di Sukorejo yang Pemkab siapkan dengan jumlah bantuan 50 juta per rumah.

Masih banyak wilayah yang terdampak akibat cuaca ekstrem dan yang masih akan terjadi. Yang menarik adalah jejak pendapat yang dilakukan pada pertengahan Oktober lalu yang menyatakan bahwa 80 persen warga Jakarta khawatir beberapa potensi yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrem ini. Banjir tidak hanya terjadi di berbagai wilayah Ibu Kota Negara, di Jawa Tengah, Cilacap (rob), Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah yang berakibat hingga aktivitas masyarakat terhambat bahkan terhenti. Akibat dari potensi bencana yang dapat merugikan masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan masyarakat mampu untuk memberikan antisipasi dampak dari cuaca ekstrem mendatang.

Dampak lain yang masih perlu diwaspadai adalah potensi munculnya gangguan kesehatan akibat bencana cuaca ekstrem ini, misalnya, DBD yang tercatat kasusnya sejak Januari hingga Oktober ini mencapai 6.000 kasus. Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap mobilitas yang terganggu seperti yang telah disebutkan di atas akan berdampak juga kepada kegiatan perekonomian masyarakat. Jalur-jalur logistik yang terputus dan menyebabkan beberapa pasokan kebutuhan pokok terhambat, hal itu tentunya berdampak kepada kenaikan harga yang harus diderita masyarakat juga kerugian dari omzet harian sektor logistik.

Keadaan bakal terjadi cuaca ekstrem bukan tanpa peringatan dan prediksi, BMKG telah mengeluarkan rilis yang bisa dijadikan peringatan bagi pemerintah guna mengantisipasi kejadian tersebut. Harapan masyarakat sangat besar kepada pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam mengantisipasi dan penanggulangan dari dampak cuaca ekstrem ini. Potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia terjadi akibat dari hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi akibat cuaca ekstrem ini. Menurut BMKG hampir seluruh wilayah di Indonesia yang diprediksi akan mengalami cuaca ekstrem ini.

Atensi DPR

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi VIII melakukan koordinasi yang intensif bersama Pemerintah yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persiapan antisipasi cuaca ekstrem dan penanganan kebencanaan yang telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Komisi VIII meminta Pemerintah Pusat untuk menyiapkan alokasi anggaran guna antisipasi dan menghadapi kejadian bencana, juga mendorong Pemerintah Pusat untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat dalam kesiapan menghadapi keadaan kebencanaan. Bersama Pemerintah, Komisi VIII mencari beberapa alternatif program yang dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kembali daya dukung lingkungan.

Sumber

Kompas, 30 Oktober 2022;
Kompas.id, 30 Oktober 2022;
Media Indonesia, 31 Oktober 2022;
Regional.kompas.com, 01 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022